

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA ORAHILI TUMORI

EVALUATION OF THE EMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM (SISKEUDES) IN ORAHILI TUMORI VILLAGE

Oleh:

Fandi Zulfian Zebua¹
Ayler B. Ndraha²
Yasminar Telaumbanua³

¹²³manajemen, Univesitas Nias, Sumatera Utara, Indonesia

E-mail:

fandizul2311@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi implementasi sistim keuangan Desa: 1) Pengelolaan pengelolaan dana desa di Desa Orahili Tumori. 2). Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Siskeudes di Desa Orahili Tumori. 3). Faktor pendukung dalam pengelolaan Siskeudes Desa di Desa Orahili Tumori. Penelitian ini dilakukan di Desa Orahili Tumori. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi implementasi pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Orahili Tumori

Kata Kunci: Evaluasi, implementasi siskeudes.

Abstract: *This study aims to determine the evaluation of the implementation of the village financial system: 1) Management of village fund management in Orahili Tumori Village. 2). Factors constraining the management of Siskeudes in Orahili Tumori Village. 3). Supporting factors in the management of Village Siskeudes in Orahili Tumori Village. This research was conducted in Orahili Tumori Village. This research is a qualitative descriptive study. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation to obtain data validity. The results showed that the evaluation of the implementation of village fund management was carried out by the Orahili Tumori Village Government*

Keywords: *Evaluation, siskeudes implementation.*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Disana juga dijelaskan bahwa definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan landasan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa desa memiliki otonomi sendiri. Adanya undang-undang tersebut berbanding lurus dengan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang juga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang lebih merata dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Dikarenakan desa memiliki kekhususan didalam pengelolaan keuangan desa maka diperlukan suatu evaluasi dengan tindakan kemandirian tersendiri. Oleh karena itu evaluasi menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa evaluasi terkait keuangan desa yaitu pada pasal 73 ayat (2) "Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010) "evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan". Menurut Dimiyati & Mudjiono (2006) Proses memberikan atau

menentukan nilai kepada objek tertentu dengan landasan suatu penilaian tertentu. Aturan dan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan yang mengulas atau menilai rencana sebelumnya sebagai bahan menentukan rencana selanjutnya, dengan demikian penilaian yang dilakukan berpengaruh juga terhadap kegiatan berikutnya. Adapun indikator yang mempengaruhi evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2000:30) adalah efektifitas, kecukupan, penerapan, responsibilitas, dan ketetapan.

Pelaksanaan sistem keuangan desa perlu arah dan tujuan serta kajian yang mendalam untuk itu maka diperlukan pemahaman tentang implementasi. Menurut Widodo (2014:10) implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, menurut Mazmanian dan Sebastiar (2008:65) Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Dari kedua teori diatas dapat disimpulkan implementasi berarti wadah yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah disepakati mau pun yang telah dibuat bersama atau oleh pihak yang berwenang atau berkuasa yang memberikan dampak ataupun akibat.

Implementasi sistem pengelolaan keuangan desa yang terjadi di desa orahili tumori ditemukan beberapa fenomenal yaitu

1. Terdapat permasalahan dimana sumberdaya manusia atau perangkat desa yg masih kurang memahami SISKEUDES dikarenakan belum mengikuti pelatihan
2. Dalam mengoperasikan SISKEUDES diperlukan jaringan yang stabil namun mengingat faktor daerah yang jaringannya kurang memadai terkadang menjadi penghambat dalam proses menjalankannya
3. Kerangka siklus waktu sulit untuk di ikuti oleh sumberdaya manusia atau perangkat desa
4. Format yang berubah setiap tahunnya atau tidak tetap membuat perangkat desa membutuhkan waktu dalam menyesuaikan kembali

Oleh karena itu, tertarik meneliti dengan judul penelitian Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Orahili Tumori.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sistem keuangan desa (SISKEUDES) dapat membantu aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
2. Untuk mengetahui Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Orahili Tumori.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menilai suatu kegiatan atau suatu kebijakan sebelumnya apakah kegiatan atau kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik dengan hasil yang memuaskan dengan dasar penilaian kriteria tertentu. Menurut Assyahri & Vaguita (2019) evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap kebijakan. Menurut Sunarti (2021:10) suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur serta membandingkan suatu hasil pelaksanaan kebijakan yang telah dicapai dengan apa yang di rencanakan sebelumnya.

Bedasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membahas ketidaksesuaian dalam perencanaan dan mencari solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut serta menilai kegiatan atau rencana tersebut berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu. Sesuai indikator yang telah di kembangkan oleh Denn (2000:30), yaitu:

1. **Efektifitas**, merupakan perbandingan hubungan antara hasil dengan tujuan yang telah tercapai sehingga dapat dilakukan penilaian dari perbandingan tersebut.
2. **Kecukupan**, mengartikan bahwa apakah hasil yang telah mampu memecahkan atau menyelesaikan masalah yang terjadi
3. **Ketetapan**, mengartikan apakah hasil yang telah dicapai dapat bermanfaat

Indikator Implementasi

Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Edward III (2011:90-92) bahwa indikator implementasi yaitu :

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi mengsyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada keompok.
2. Sumber daya, implementor harus memiliki sumber daya yang berupa sumber daya manusia dalam wujud implementor yang kompeten dan finansial yang mencukupi.
3. Disposisi, merupakan sifat dan karakteristik dari seorang implementor. Apabila seorang implementor memiliki disposisi yang sangat baik maka pencapaian akan berhasil dengan baik, namun apabila implementor bersikap perspektif dari kebijakan yang telah dibuat maka hasilnya tidak akan efektif.

Penelitian Terdahulu

Arif Rivan & Irfan Ridwan Maksum dengan judul penelitian Penerapan Sitem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil penelitian menunjukkan kurangnya aparat mengalami kesulitan dalam sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang berbasis aplikasi serta kurangnya sarana pendukung. Perangkat desa harus menjalin komunikasi yang baik serta sistem kepemimpinan dan komitmen agar menjadi perhatian masyarakat desa dengan begitu penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) berjalan dengan baik.

Fuaddianto fajar satrio (2020) dengan judul penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan hasil penelitian menunjukkan terlambatnya desa dalam pencairan dana desa di akibatkan tidak sesuainya ketentuan yang telah ditetapkan yang di pengaruhi oleh kebijakan pimpinan yang mengganti aparat desa khususnya operator sistem keuangan desa (SISKEUDES).

METODE PENELITIAN

Bedasarkan fokus permasalahan yang saya tentukan dari masalah-masalah yang berisi narasi-narasi yang bermuatan argumentasi atau pendapat yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugyono (2018:86) metode penelitian adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Sukmadinata (2017:72) pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun buatan manusia bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu maupun fenomena yang lain.

Pendapat Meleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata an bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan maemanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Hendrayani, et,al (2019:218), peneliti kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secaa alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan melalui kuestioner melainkan berasal dari wawancara, observasi, langsung dan dokumentasi resmi yang terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2013:225). Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013:231). informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap benar-benar mengetahui dengan pokok pembahasan penelitian yakni Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dalam Upaya peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa. Pada proses wawancara beberapa perangkat desa yang dilibatkan yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan.

Tabel 1. Profil informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Elibudi Zebua	Kepala desa	1
2.	Bowonama Zebua	Bendahara desa	1
3.	Samabudi Zebua	Kasi humas	1

Sumber: olahan data (2022)

Dalam penelitian deskriptif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan dan dapat membuktikan bahwa peneliti turun tangan langsung untuk melakukan penelitian serta dalam membuat formatnya. Peneliti deskriptif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013:222)

Dalam penelitian deskriptif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti deskriptif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013:222). Dengan bantuan beberapa alat yang dapat mendukung penelitian seperti komputer alat tulis yang digunakan mencatat hal-hal penting yang dianggap berguna, handpone yang digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh untuk menghubungi informan serta sebagai alat dokumentasi, dan yang terakhir komputer dan aplikasinya digunakan untuk mengetik hasil penelitian.

“Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan Pembangunan. Kecamatan atau kecamatan adalah salah satu perangkat daerah yang menjadi penyelenggara pelayanan umum di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh badan usaha umum untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah di wilayah kerjanya serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat dengan memperoleh bagian dari kewenangan kepala daerah (Ndraha, 2000:85-90)”.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Orahili Tumori

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh badan pemeriksaan keuangan (BPKP) bersama dengan kementerian dalam negeri pada Tahun 2015. Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang ada pada Desa Orahili tumori mulai dari tahun 2018 sudah menggunakan sebuah Aplikasi dalam membuat laporan keuangan yakni dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), hal ini di sampaikan Bapak Bowonama Zebua sebagai bendahara desa informan dari penelitian. “Siskeudes itu sendiri di terapkan pada Desa Borongtala itu pada Tahun 2018, sebelumnya dalam membuat laporan keuangan desa itu dengan menggunakan pencatatan manual saja tanpa sebuah aplikasi Siskeudes.

Pembahasan

Efektifnya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel- variabel serta indikator penentu kebijakan. Variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan implementasi yang efisien. Dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat, peneliti menggunakan model Evaluasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace

A. Franklin yang menggunakan dua variabel utama yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening and why?* (apa yang terjadi dan kenapa?) yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini :

Perspektif *Compliance* (kepatuhan) Perspektif *compliance* (kepatuhan) melihat agen-agen administratif dan individu-individu yang ada didalamnya bersifat fungsional dalam suatu tatanan hirarki administrasi dan menunjukkan adanya batas-batas kedudukan yang superior dan subordinat dalam unit-unit birokrasi dan para birokrat. Fokus *compliance* dari evaluasi implementasi dalam penelitian ini adalah menguji apakah pelaksanaan yang sudah dilakukan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan (baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturan) dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementornya mematuhi aturan- aturan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) indikator dalam pendekatan kepatuhan yaitu Perilaku Implementor dan Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan. Pada pemerintahan yang semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa, maka Kepala Desa dan perangkat desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbentuknya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah Desa mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Komitmen moralitas melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki aturan untuk melihat perilaku. Kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan dilapangan peneliti melihat Kantor Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban lembaga untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dalam aplikasi Siskeudes laporan tahunan wajib disertai dengan laporan keuangan dan disampaikan kepada Bupati. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun pemerintah desa untuk menyampaikan laporan keuangan triwulan dan tahunan secara tepat waktu kepada pemerintah daerah. Kepatuhan dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan Desa dimaksud khususnya penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat yaitu Bendahara yang melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa yang diperintahkan oleh Kepala Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat. Kepatuhan itu sudah cukup baik yang dilakukan Bendahara Keuangan selaku individu bawahan yang selalu mendengarkan arahan pimpinan dalam hal ini Kepala Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat, sebagai contoh mengerjakan pelaporan keuangan dan penginputan data ke aplikasi siskeudes yang diselesaikan dengan baik. Bendahara merupakan jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola keuangan dalam suatu organisasi sama seperti dalam penelitian ini Bendahara Keuangan di Kantor Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik jika lihat dari kepatuhan antara bawahan kepada atasan, namun jika dilihat dari kepatuhan waktu dalam penyerahan laporan keuangan yang berupa laporan dari Siskeudes dalam pencairan Keuangan Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat belum tepat waktu dari yang ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan di Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes pada ketentuan yang berlakubelum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya kendala pada ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan antara desa ke Bupati. Selain kendala tersebut, masih adanya ketimpangan dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsinya masing-masing pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan pelaporan keuangan dalam hal ini yaitu bendahara Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, secara umum pelaksanaan kebijakan di Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat bisa dikatakan masih belum optimal, memang semua dilaksanakan sesuai aturan dan pedoman yang ada namun masih ada kendala dalam pembuatannya. Selain kendala waktu keterlambatan dalam penyerahan laporan realisasi dana Desa yang memerlukan waktu yang lebih lama dari target yang ditentukan. Keterlambatan ini disebabkan juga penggunaan format dan aplikasi berupa siskeudes yang berbeda jauh dari dalam format laporan realisasi dana Desa yang diinginkan Kementerian Keuangan. Untuk media informasi di Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat masih belum optimal dalam memberikan informasi kepada publik di Kantor Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat. Sedangkan dapat kita ketahui bahwa media informasi sebenarnya sangat penting dan dapat dimanfaatkan sebagai media informasi yang sangat baik sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas dan transparansi tentang apa yang telah dilakukan

Pemerintah Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Orahili Tumori Gunungsitoli Barat.

Perspektif *What's Happening and Why?* (apa yang terjadi dan mengapa) Perspektif *What's Happening* memiliki asumsi banyak faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program. Berdasarkan asumsi tersebut, perhatian studi diarahkan untuk menemukan dan membuat spesifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi. Bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksana yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya. Evaluasi implementasi kebijakan dengan perspektif *what's happening* dapat mencakup faktor-faktor yang mempengaruhinya dan hasil jangka pendek.

Faktor yang mempengaruhi implementasi

Dalam pelaksanaan implementasi sebuah program atau kebijakan, tidak pernah terlepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proses implementasi tersebut. Faktor-faktor tersebut muncul diluar kendali implementor, sehingga dapat mengganggu jalannya implementasi program yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi berbagai faktor atau gangguan teknis yang muncul, maka diperlukan perilaku dan reaksi dari implementor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari beberapa faktor tersebut bisa ditarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Seperti halnya kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tujuan dari adanya aplikasi Siskeudes adalah memberikan kemudahan terhadap Desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes memiliki regulasi dan tahapan yang jelas berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Termasuk didalamnya aplikasi ini sudah lengkap seperti tahap perencanaan pembangunan desa, penganggaran keuangan Desa, pelaksanaan keuangan Desa, penatausahaan keuangan Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berperan aktif dan sebagai aktor utama didalam proses evaluasi implementasi aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Pemerintah Desa Orahili tumori berkomitmen memperkuat Desa dengan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Komunikasi implementasi SISKEUDES di Kabupaten Pati sudah berhasil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis di tingkat kabupaten dan dilanjutkan di setiap kecamatan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini segala urusan evaluasi pengelolaan Desa sangat terbantu, di bandingkan dengan dulu yang hanya menggunakan manual.

Dari segi sumberdaya material sebagai penunjang implementasi SISKEUDES sudah terbilang optimal hal ini diperkuat dengan fakta dilapangan bahawa didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, Desa Orahili tumori telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana berupa server yang cukup besar sebagai data penyimpanan hasil laporan keuangan Desa Orahili tumori, Pemerintah Desa Orahili tumori mulai maka dari itu pada tahun 2018, melakukan pengangkatan perangkat desa baru yang menguasai teknologi informasi maupun di bidang keuangan Desa. Jadi diharapkan pengelolaan keuangan Desa dipegang oleh orang yang berkompeten di bidang tersebut, mampu mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES dengan baik dan benar.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal untuk

dilakukan pada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. Beberapa saran dari peneliti antara lain sebagaiberikut.

1. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan model penelitian lain untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan SISKEUDES atau dapat mengukur tingkat kepuasan penggunaan SISKEUDES.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dalam cakupan yang lebih luas seperti membandingkan penggunaan SISKEUDES antar kecamatan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah indikator pengukuran agar hasil yang diperoleh lebih akurat.
4. Diharapkan Pemerintah Desa Taraitak Satu dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
5. Lebih bersosialisasi dengan pemerintah setempat atau pendamping desa agar lebih meminimalisir terjadinya *error* pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

DARTAR PUSTAKA

- Katz, E. (2004). *Transparancy in Government How American Citizens Influence Public Policy. Journal of Accountancy, Juni 2004, hal. 1-2.* Disunting oleh Idhar Yahya. Oktober 2006. Dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. 7 (4) *Jurnal Sistem Teknik Industri.*
- Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2015. Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pengganti Permendagri nomor 37 tahun 2007.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. **Kybernologi** (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2000). **Ilmu Pemerintahan** Jilid I-IV. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Arikunto, S dan Cepi, Abdul Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahapeserta didik dan Praktisi Pendidikan Jakarta: Bumi Aksara.*
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (20170). *Metode Penelitian Pendidikan, Cet,12. Bandung: remaja Rosdakarya.*